|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JEA | Jurnal Eksplorasi AkuntansiVol. 1, No 4, Seri B, November 2019, Hal 1756-1772  | ISSN : 2656-3649 (Online)http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/15 |

**PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Rani Sri Wahyuni1, Erinos NR2**

1Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

2Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: ranisriwahyuni@gmail.com

***Abstract:*** *This studyaimed to examine the effect of budgeting participation, public accountability and job relevant information to managerial performance. This research is classified as causative research. The population in this study are 39 Regional Organizations (OPD) of West Sumatra Province. The sample in this study used the Total Sampling method. The type of data used in this study is primary and secondary data. Data collection techniques using a questionnaire consisting of 3 respondents in each OPD so that the questionnaire distributed was 117 questionnaires. The analytical method used is Multiple Regression Analysis using the SPSS version 20.00 program. The result of the study showed participation has a significant positive effect on managerial performance. However public accountability and job relevant information have no effect on managerial performance.*

***Keywords:*** *bugeting participation; public accountability and job relevant information; managerial and performance****.***

**How to cite (APA 6th style)**

Wahyuni, R.S. & Erinos N.R, (2019). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik dan *Job Relevant Information* terhadap Kinerja Manajerial pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), Seri B, 1756-1772.

**PENDAHULUAN**

Kinerja adalah suatu gambaran atas prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu (Indra, 2006). Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkatan sejauhmana pemerintah dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ukuran keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat salah satunya yaitu dari kinerja manajerialnya hal ini dikarenakan manajer merupakan individu yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan (Nengsy, 2013). Kinerja manajerial pemerintahan daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur instansi tersebut.

Kinerja manajerial pemerintah daerah menjadi sorotan publik atas pelayanan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah (Sari, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk dari wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah tidak lagi dibuat di pemerintah pusat, melainkan dibuat di pemerintah daerah sendiri. Anggaran disusun agar dapat membantu manajemen mengkomunikaskan tujuan organsasi semua manajer pada unit organisasi dibawahnya, untuk mengkoordinasikan kegiatan dan untuk mengevaluasi kinerja manajer.

Fenomena yang terjadi pada saat ini, realisasi pendapatan dan belanja baerah provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan DPRD Sumatera Barat. Pasalnya pada data Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setprov Sumatera Barat realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Semester I baru mencapai 39,46% untuk realisasi keuangan. Ketua DPRD Sumatera Barat meminta agar Gubernur Sumatera Barat terus menggenjot kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerapan anggaran. Serapan anggaran yang rendah akan memiliki dampak negatif terhadap ekonomi, sehingga harus dilakukannya evaluasi terhadap OPD yang bermasalah dalam realisasi anggaran.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan akan mengultimatum kepala OPD agar menyelesaikan realisasi anggaran anggaran minimal 95% sampai November tahun ini dan menyebutkan tidak segan mengganti pejabat OPD yang berkinerja buruk atau gagal mencapai realisasi anggaran tahun ini minimal 95% (Padang Ekspres, 2018). Pada Triwulan III tahun anggaran 2018 realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai Rp. 3.463.974.152.960 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.895.649.672.146 atau baru mencapai 50,23% (Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, 2018). Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal.

Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial yang pertama yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran. Sumarno (2005) mengemukan bahwa partisipasi anggaran yaitu tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran sangat erat hubungannya dengan kinerja manajerial pemerintah daerah, karena kinerja pemerintah daerah dilihat berdasarkan partisipasi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran. Aparat perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Penelitian sebelumnya yang menyatakan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial yaitu oleh Amril (2014), Ginting (2010) dan Irzani (2018). Akan tetapi, hasil penelitian yang lain menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial tidak didukung oleh hasil penelitian Ningsih (2017), Ilmawan (2017), Yulianingsih (2017) dan Ermawati (2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja manajerial yaitu akuntabilitis publik. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan Sari (2016) pengaruh akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemeritah daerah sejalan dengan Ningsih (2017), Putra (2013) dan Sari (2014). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2016) dan Amril (2014) akuntabilitas publik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemeritah daerah.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah adalah *job relevant information. Job relevant information* adalah informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas (Kren, 1992 dalam Nengsy, 2013). Informasi mengenai *job relevant* merupakan informasi yang dapat membantu manajer dalam memilih tindakan yang terbaik melalui upaya yang diinformasikan secara lebih baik misalnya yang berkaitan dengan kondisi perekonomian dan kondisi keuangan organisasi. Pada saat penyusunan dan pelaksanaan anggaran *job relevant information* diperlukan oleh seorang manajer tingkat atas untuk mengambil tindakan agar tercapai hasil yang baik. Hal ini disebabkan karena dengan dengan tersedianya informasi yang relevan dengan tugas maka umpan balik di dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran akan dirasakan manfaatnya sehingga mempertinggi kinerja manajerial. Sebab *job relevant information* memungkinkan perkiraan yang lebih akurat atas altenatif tindkan yang dimbil oleh seorang manajer tingkat atas. Penelitian Rison (2017) menemukan bahwa *job relevant information* tidakberpengaruh terhadap kinerja manajerial sejalan dengan penelitian Nengsy (2013).Nugraheni (2015) menyatakan bahwa *job relevant information* berpengaruhpositif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

Penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja manajerial karena adanya fenomena yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat mengenai masih rendahnya realisasi APBD dan masih terdapat ketidakkonsistenan hasil dengan penelitian sebelumya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik dan *Job Relevant Information* terhadap Kinerja Manajerial pada OPD Provinsi Sumatera Barat”**.**

**REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

**Teori Penetapan Tujuan *(Goal Setting Theory)***

Teori penetapan tujuan yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan (Birnberg dalam Mahennoko, 2011). Teori penetapan tujuan beransumsi bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran yaitu bertekad untuk tidak menurunkan/meningkatkan sasaran, hal tersebut paling besar kemungikinan untuk terjadi bila sasaran itu ditentukan sendiri dan bukannya di tugaskan. Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja).

Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang.Berdasarkan pendekatan *goal theory* kinerja manajerial yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya. Sedangkan variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas publik dan *job relevant information* sebagai faktor penentunya. Semakin tinggi faktor penentu tersebut maka pencapaian tujuan akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya.

**Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah**

Afrida (2013) mengemukakan bahwa kinerja manajerial pemerintahan daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur instansi tersebut. Kinerja (prestasi) manajer publik dinilai berdasarkan beberapa target yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan yang dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2009).

Pengungkapan kinerja pemerintah daerah secara tepat dan objektif akan memungkinkan terlaksananya evaluasi kinerja. Menurut Mahoney (1963) dalam Amril (2014) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negoisasi, dan perwakilan

**Partisipasi Penyusun Anggaran**

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakuan bersama antara dua orang atau lebih yang memiliki dampak terhadap masa depan bagi pihak-pihak yang membuat keputusan tersebut.

Partisipasi penyusunan anggaran terdiri dari 6 indikator (Milani, 1975) dalam Amril (2014), yaitu:

1. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.
2. Diskusi antar pegawai dan atasan untuk mengambil keputusan sebelum penetapan anggaran.
3. Usulan oleh pegawai kepada pihak atasan tanpa diminta selalu diterima.
4. Atasan memberi penilaian positif terhadap kontribusi yang diberikan oleh pegawai.
5. Atasan meminta diminta usulan pegawai setiap periode penyusunan anggaran.
6. Pegawai dimintai usulan apabila atasan merasa membutuhkan

**Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelasanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal *(vertical accountability)* dan akuntabilitas horizontal *(Horizontal Accountability)*.

Mardiasmo (2001) dalam Amril (2014) terdapat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas proses

***Job Relevant Informasi***

*Job relevant information* (*JRI*) merupakan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. JRI meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik (Kren (1992) dalam Nugraheni (2015). Tersedianya informasi yang berhubungan dengan tugas akan meningkatkan pilihan terhadap tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. *Job relevant information* menunjukkan peran informasi dalam memudahkan pembuatan keputusan yang berhubungan dengan jabatan.

Informasi yang diberikan manajer dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kemampuan individual terhadap kinerja (Yusfaningrum, 2005). Sehingga dengan adanya informasi yang relevan dengan tugas maka tujuan yang diharapkan akan tercapai. Kren (1992) dalam Rison (2017) indikator *job relevant information* yaitu mendapatkan informasi yang jelas, memiliki informasi yang memadai, memilih informasi yang strategis, mencari informasi yang tepat, informasi yang berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan organisasi.

**Hubungan Partisipasi Penyusun Anggaran dengan Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah**

Partisipasi dianggap sebagai sarana aktualisasi yang terbaik untuk para pekerja dalam rangka mengingatkan diri mereka kepada masing- masing tanggung jawab atas tugas yang diemban. Partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya atau penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk ikut serta bekerja sama menetukan rencana. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2016) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD sejalan dengan penelitian Arum (2016). Berdasarkan penjelasan hasil dari penelitian tersebut, peneliti menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017) bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. Karena ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah.

**Hubungan Akuntabilitas Publik dengan Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2009).Penelitian Sari (2016) menjelaskan jika tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya.

Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ningsih (2017) bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, namun berbeda dengan Arum (2016). Berdasar uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas publikterhadap kinerja manajerial perangkat daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah.

**Hubungan *Job Relevant Information* dengan Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah**

*Job relevant information* (*JRI*) merupakan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Pemberian kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, menghasilkan pengungkapan informasi pribadi informasi tersebut akan menghasilkan rencana yang lebih realistis dan anggaran yang lebih akurat. *Job Relevant Information* diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer. Semakin tinggi tingkat JRI maka akan semakin meningkatkan kinerja manajer (Kren (1992) dalam Nugraheni (2015). Chandralis (2014) juga menyatakan jika semakin banyak informasi yang didapatkan maka akan semakin efektif dan efisien kinerja manjerial. Informasi yang tersedia tersebut membantu manajer dalam membuat keputusan-keputusan penting serta dapat membantu manajer untuk memprediksi keadaan lingkungan organisasi secara tepat.

Penelitian mengenai hubungan *job relevant information* dan kinerja manajerial yang dilakukan oleh Ilah (2016) dan Nugraheni (2015) menemukan bukti empiris yang menyatakan bahwa *job relevant information* berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja manajerial namun berbeda dengan Rison (2017). Berdasar uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh *job relevant information* terhadap kinerja manajerial perangkat daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3:** Pemanfaatan *job relevant information* berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran (X1)

Kinerja Manajerial Pemeritah Daerah (Y)

Akuntabilitas Publik (X2)

*Job Relevant Information* (X3)

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif yaitu berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya.

**Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sebagai daerah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Populasi pada penelitian ini adalah 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* resmi Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari dinas, badan, kantor, dan inspektorat.

**Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner kepada responden yang terpilih.

**Teknik Analisis Data**

**Uji validitas dan reliabilitas**

Uji validitas digunakan untuk untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Corrected Product Moment.* Uji reliabilitas digunakan untukmengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α).

**Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik.

1. **Uji Normalitas Residual**

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas residual untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan.

1. **Uji Multikolenearitas**

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflantion Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance > 0.1.*

1. **Uji Heterokedastisitas**

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain.

**TeknikAnalisis Data**

1. **Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square)***

Koefisien determinasi *(R Square)* pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat.

1. **Persamaan Regresi**

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

**Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e**

Dimana :

Y = Kinerja manajerial

a = Konstanta

X1 = Partisipasi dala penyusunan Anggaran

X2 = Akuntabilitas Publik

X3 = Job Relevant Information

b1,2,3 = Koefisien regresi dari variabel independen

e = *error term*

1. **Uji F (F-test)**

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

1. **Uji T *(t-Test)***

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari α = 5%, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Hasiluji *corrected item-total correlation* untuk masing-masing instrumen yaitu lebih dari 0,1680. Partisipasi dalam penyusunan Anggaran (X1) diketahui nilai *corrected item-total correlation* sebesar 0,506, akuntabilitas publik (X2) adalah sebesar 0,574 dan *job relevant information* (X3) adalah sebesar 0,668 dan kinerja manajerial (Y) adalah sebesar 0,533. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan variabel Y, X1, X2, dan X3 adalah valid. (**Lampiran 1**). Semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,60 jadi dapat dikatakan semua konsep pengukuran pada masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. (**Lampiran 2**)

**Uji Asumsi Klasik**

1. **Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas menunjukkan level signifikasi lebih besar dari α (α=0,05) yaitu 0,94 > 0,05 yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal. (**Lampiran 3**)

1. **Uji Multikolenearitas**

Variabel partisipasi dalam penyusun anggaran (X1) dengan nilai VIF 1,002 dan *tolerance* 0,998, variabel akuntabilitas publik (X2) dengan nilai VIF 1,000 dan *tolerance*  1,000 dan variabel *job relevant information* (X3) dengan nilai VIF 1,002 dan *tolerance*  0,998 dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan lainnya, atau variabel independen pada penelitian ini bebas dari gejala multikolenearsitas karena nilai VIF seluruh variabel ≤ 10 dan nilai *tolerance* dari seluruh variabel ≥ 0,10.(**Lampiran 4**)

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Hasil grafik scatterplot memperlihatkan titik-titik pola penyebaran data yang tidak terpusat pada satu titik tertentu, hasil tersebut mendukung pola distribusi data secara normal pada uji normalitas. Hasil tersebut juga mencerminkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada data yang di uji dan layak untuk diteliti. (**Gambar 1**)

**Teknik Analisis Data**

**Analisis Deskriptif**

Nilai rata-rata *(mean)* kinerja manajerial sebagai variabel dependen sebesar 30,3158 dengan standar deviasi sebesar 3,18328. Nilai maksimum dan minimum kinerja manajerial adalah 40 dan 19. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 21,4737 dengan standar deviasi 2,35129. Nilai maksimum dan minimum pada ini variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah 27 dan 16. Variabel independen yang kedua adalah akuntabilitas publik memiliki nilai rata-rata sebesar 31,0421 dengan standar deviasi 2,98904. Nilai maksimum dan minimum variabel akuntabilitas publik adalah sebesar 39 dan 24. Selanjutnya variabel independen yang ketiga adalah *job relevant information* memiliki nilai rata-rata sebesar 19,2947 dan standar deviasi 1,84433.Nilai maksimum dan minimum variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 25 dan 15. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini beragam dan bervariasi dikarenakan standar deviasi yang dimiliki oleh semua variabel besar dari 0. (**Lampiran 5**)

**Uji Model**

1. **Analisis Regresi Berganda**

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dianalisis model persamaan sebagai berikut:

**Y = 23,934 + 0,414 X1 + 0,008 X2 - 0,212 X3 + *e***

Keterangan:
Y = Kinerja Manajerial
X1 = Partisipasi dalam Penyusunan Anggara
X2 = Akuntabilitas Publik
X3 = *Job Relevant Information* (**Lampiran 6**)

1. **Uji F**

Nilai F = 3,781 dengan nilai signifikansi sebesar P *value* = 0,013 yang lebih kecil dari α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan ketiga variabel mampu menjelaskan kinerja manajerial pada OPD di Provinsi Sumatera Barat (**Lampiran 7**)

1. **Koefisien Determinasi (R2)**

*Adjusted R Square* adalah 8,2%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa konstribusi variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas publik dan *job relevant information* adalah sebesar 8,2%, sedangkan 91,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian (**Lampiran 8**)

1. **Uji T**

**Pengujian Hipotesis 1**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis diterima jika thitung > t tabel atau nilai sig < 0,05. Nilai t tabel pada = 0,05 adalah 1,661. Variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,045 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hitung > tabel yaitu 3,045 > 1,661 atau nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Nilai koefisien β dari variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1) bernilai Positif yaitu 0,414. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis pertama (H1) **diterima.**

**Pengujian Hipotesis 2**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai sig < 0,05. Nilai t tabel pada = 0,05 adalah 1,661. Variabel akuntabilitas publik (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 0,093 dan nilai sig adalah 0,926. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung < t tabel yaitu 0,09< 1,661 atau nilai signifikasi 0,926 > 0,05. Nilai koefisien β dari variabel akuntabilitas publik (X2) bernilai Positif yaitu 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan akuntabilitas publik (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis kedua (H2) **ditolak.**

**Pengujian Hipotesis 3**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai sig < 0,05. Nilai ttabel pada = 0,05 adalah 1,661. Variabel *job relevan information* (X3) memiliki nilai thitung sebesar -1,254 dan nilai sig adalah 0,213. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung < t tabel yaitu -1,254< 1,661 atau nilai signifikasi 0,213 > 0,05. Nilai koefisien β dari variabel *job relevan information* (X3) bernilai negatif yaitu -0,212. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan *job relevan information* (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) **ditolak.**

**Pembahasan**

**Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi 0,003< 0,05 dan koefisien β bernilai positif yaitu 0,414. Hasil tersebut mencerminkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat

*Goal setting theory* menyatakan untuk meningkatkan kinerja individu maka tujuan harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya dengan cara ikut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan tujuan cenderung kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan oleh atasan saja. Sejalan dengan yang disampaikan Arum (2016) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial, ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan organisasi pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan serta memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya sehingga aparat pemerintah daerah merasa lebih produktif dan puas terhadap pekerjaannya dan muncul prestasi-prestasi dari tanggung jawab yang dipegang dan sehingga meningkatkan kinerja.

Peningkatan kinerja manajerial dapat dilakukan dengan memberi penilaian positif terhadap kontribusi yang diberikan pegawai sebab akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sehingga dapat menumbuhkan motivasi pegawai karena akan merasa dihargai didalam organisasi organisasi sehingga pegawai akan ikut berpartisipasi dalam organisasi. Partisipasi aparat dalam penyusunan anggaran juga memungkinkan para manajer tingkat menengah dan bawah pada pemerintah daerah terdorong untuk memberikan informasi yang dimilikinya sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial yaitu oleh Amril (2014), Ginting (2010) dan Irzani (2018). Akan tetapi, hasil penelitian yang lain menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial tidak didukung oleh hasil penelitian Ningsih (2017), Ilmawan (2017), Yulianingsih (2017) dan Ermawati (2017).

**Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak dan disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi 0,09 > 0,05 dan koefisien β bernilai positif yaitu 0,008. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi variabel, rata-rata Tingkat Capaian Responden (TCR) menunjukkan kategori baik dengan angka 77,61%. Berdasarkan data tersebut akuntabilitas publik pada OPD Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dan tetapi tidak mempengaruhi kinerja manajerial, sehingga tingkat capaian responden yang baik ini tidak dapat membuktikan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ningsih (2017), Putra (2013) dan Sari (2014) yang menyatakan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemeritah daerah.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial, karena dengan adanya akuntabiliatas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerjanya. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Arum (2016) dan Amril (2014).

**Pengaruh *Job Relevant Information* terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak dan disimpulkan bahwa *job relevant information* tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.. Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara parsial nilai signifikansi 0,213> 0,05 dan koefisien β yaitu -0,008. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi variabel rata-rata Tingkat Capaian Responden (TCR) menunjukkan kategori baik dengan angka 77,61% nilai TCR yang rendah terdapat pada nomor 2 sebesar 74,11%. Berdasarkan data tersebut *job relevant information* pada OPD Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dan tetapi tidak mempengaruhi kinerja manajerial. Sehingga tingkat capaian responden yang baik ini tidak dapat membuktikan bahwa *job relevant information* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial.

Implikasi penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya koordinasi antara pelaksana dengan manajer dalam pembuat keputusan dengan tugas pada sebuah instansi tidak lengkap maka akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pertukaran informasi didalam instansi atau organisasi sangat diutamakan dalam pengambilan keputusan atas suatu tugas yang ditanggung oleh aparat. Informasi yang diberikan manajer dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kemampuan individual terhadap kinerja (Yusfaningrum, 2005). Alasan hasil hipotesis ditolak mungkin karena adanya penerapan budaya organisasi pada sebagian organisasi, dimana otoritas atasan adalah mutlak sehingga tujuan yang diterapkan bersifat subjek serta menekan bawahan. Tekanan atasan tersebut dapat menyebabkan manajer pada instansi atau organisasi pemerintah tidak memberikan informasi yang dimiliki kepada atasan. Mereka hanya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh atasan. Informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan dengan tugas tidak lengkap, maka keputusan yang diambil pun tidak optimal (Yusfaningrum, 2005).

Pentingnya informasi yang relevan dengan tugas merupakan bagian dari kinerja seorang manajer yang harus diperhatikan dengan baik agar terlaksananya tujuan dalam sebuah organisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Rison (2017). Tetapi, tidak sejalan dengan penelitian dengan Nugraheni (2015) yang menyatakan *job relevant information* berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemeritah daerah

**KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat.
3. *Job relevant information* tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat.

**Keterbatasan Penelitian**Penelitian yang dilakukan masih banyak memilki kekurangan dan keterbatasan

1. Penelitian ini hanya meneliti pada OPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk pemerintah provinsi lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian.
2. Nilai adjusted R-square sebesar 8,2% menunjukan masih banyaknya variabel lain yng memiliki kontribusi yang lebih besar mempengaruh kinerja manajerial.
3. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data hanya melalui kuesioner sehingga masih ada kemungkinan beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban responden yang tidak cermat serta pertanyaan yang kurang dipahami responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk melakukan evaluasi bagi pejabat yang tidak sesuai dengan kemampuannya dengan jabatan yang dipegangnya saat ini.
2. Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperoleh data melalui sumber lain seperti wawancara dari beberapa responden, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menghindari pengisian kuesioner yang kurang tepat.
3. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel lain seperti kejelasan sasara anggaran, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi serta memperluas objek penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afrida, N. (2013). Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 13-19.

Amril, V., N. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Arum, N., S. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Studi Pada Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal*. 3(1): 249-263.

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumatera Barat. 2018. Info Realisasi APBD. (Online). <http://dpkd.sumbarprov.go.id>. Diakses pada 17 Februari 2019.

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*.* Jakarta: Salemba Empat.

Chandralis, M. 2014. Pengaruh *Job-Revelant Informations, Role Ambiguity* dan *Role Conflict* Terhadap Kinerja Pegawai Pada DPPKA Kota Bengkulu. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.

Ermawati, N. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia,* 6(2): 141- 156*.*

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.* Semarang*:* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ginting. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Ilah, F dan Heri Y. (2016). Determinan Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, 5(1): 1- 9.

Indarto, S., L Dan Stephana D., A. (2011). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI). *Jurnal Ilmiah*, 14(1): 1-13.

Indra, B. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

Irzan, M dan Syukriy A. (2018). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Struktur Desentralisasi, dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Skpk Banda Aceh). *Jurnal*. 3(2), 254- 264.

Kusuma, A., A.2013. Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Hotel Muria semarang*. Skrips*i. Universitas Ekasakti.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Nengsy, H., Ria, N. & Restu A. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaranterhadap *Job Relevan Information (JRI),* Kepuasan Kerja dan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi.* 2(1): 1- 17.

Ningsih, Y., I. (2017). Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada SKPD Kabupate Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,* 17(3): 177- 195.

Nugraheni, A., C 2015. Determinan Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kabupaten Banjarnegara)*.* *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Padang Ekspres. 2018. Realisasi APBD masih rendah DPRD Minta OPD Bekerja Maksimal. Padang. ( Online). <http://padang.bpk.go.id>. Diakses pada 12 Januari 2019.

Peraturan Perundang- undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintah daerah.*

Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap KinerjaManajerial. *Skripsi.* Universitas Negeri Padang.

Ramandei, P. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Rison. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi, *Job Relevant Information* dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat). *Skripsi.* Universitas Negeri Padang.

Sari, D., P,. Intan P., Sinarwati, N., K dan Edy S. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi*. 2(1): 1-12.

Sari, Eka Jas Oktavia. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal*. 3(1):380- 393.

Sugiyono. (2011). Metode Pe*nelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.*

*Sugiyono.(2013). Metode* Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Yusfaningrum. K. Dan Ghozali. I. 2005. Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaraterhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan *Job Relevant Information* (JRI) sebagai Variabel Intervening (Penelitian terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Tesis*. Universitas Diponegoro.

**Lampiran**

**Lampiran 1: Uji Validitas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Instrumen Variabel** | **Nilai *Corrected Item-Total Correlation* Terendah** |
| Kinerja Manajerial (Y) | 0,533 |
| Partisipasi dalam penyusunan Anggaran (X1) | 0,506 |
| Akuntabilitas publik (X2) | 0,574 |
| *Job relevant information* (X3) | 0,668 |

**Lampran 2: Uji Reliabilitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrumen Variabel** | **Nilai Cronbach Alpha** | **Keterangan** |
| Kinerja Manajerial OPD (Y) | 0,766 | Reliabel |
| Partisipasi dalam Penyusunan Aggaran (X1) | 0,685 | Reliabel |
| Akuntabilitas Publik (X2) | 0,807 | Reliabel |
| *Job Relevant Information* (X3) | 0,671 | Reliabel |

**Lampiran 3: Uji Normalitas**

|  |
| --- |
| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |
|  | Standardized Residual |
| N | 95 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 0E-7 |
| Std. Deviation | ,98391316 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,054 |
| Positive | ,039 |
| Negative | -,054 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | ,531 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,941 |

**Lampiran 4: Uji Multikolinearitas**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | Collinearity Statistics |
| Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |   |   |
| Partisipasi | 0,982 | 1,018 |
| Akuntabilitas | 0,979 | 1,021 |
| Job Relevant | 0,994 | 1,006 |

**Lampiran 5: Descriptive Statistic**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistics** |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Kinerja Manajerial | 95 | 19,00 | 40,00 | 30,3158 | 3,18328 |
| Partisipasi Anggaran | 95 | 16,00 | 27,00 | 21,4737 | 2,35129 |
| Akuntabilitas Publik | 95 | 24,00 | 39,00 | 31,0421 | 2,98904 |
| Job Relevant Information | 95 | 15,00 | 25,00 | 19,2947 | 1,84433 |
| Valid N (listwise) | 95 |  |  |  |  |

**Lampiran 6: Uji Regresi Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 23,934 | 4,912 |   | 4,873 | ,000 |
| Partisipasi Anggaran (X1) | ,414 | ,136 | ,304 | 3,045 | ,003 |
| Akuntabilitas Publik (X2) | ,008 | ,090 | ,009 | ,093 | ,926 |
| Job Relevant (X3) | -,212 | ,169 | -,124 | -1,254 | ,213 |
| 1. Dependent Variable: Kinerja Manajerial
 |

**Lampiran 7: Uji F**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 101,746 | 3 | 33,915 | 3,781 | ,013b |
| Residual | 816,254 | 91 | 8,970 |  |  |
| Total | 918,000 | 94 |  |  |  |
|  |
|  |

**Lampiran 8: Uji Adjusted R Square**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,333a | ,111 | ,082 | 2,99497 |
|  |

**Lampiran 9: Uji Heterokedastisitas**

